

Primordialisme dan Perilaku Memilih Etnis Melayu pada Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau 2005-2015

Kustiawan ^{1,*}  dan Rumzi Samin ² 

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 29100, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia

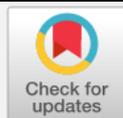
² Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 29100, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia

* Korespondensi: kustiawan@umrah.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



Sitasi Cantuman:

Kustiawan, K., & Samin, R. (2020). Primordialism and Voting Behavior of Malay Ethnic during the 2005-2015 Riau Islands Governor Election. *Society*, 8(2), 372-389.

DOI: [10.33019/society.v8i2.207](https://doi.org/10.33019/society.v8i2.207)

Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui primordialisme dan perilaku memilih etnis Melayu pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kepulauan Riau 2005-2015. Fenomena politik di Kepulauan Riau tampak berbeda dengan daerah lain yang didominasi etnis Melayu sejak kandidat dari etnis non-Melayu memenangkan pemilihan gubernur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi langsung. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menemukan bahwa masyarakat etnis melayu berpikiran terbuka. Kandidat yang terpilih juga dapat membuktikan personal yang berkualitas dan berhasil memimpin etnis melayu untuk maju. Etnis non-Melayu memenangkan Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) ditentukan oleh 1) Politik identitas masyarakat etnis melayu adalah berpikiran terbuka, berdampingan dengan identitas Islam, berbicara bahasa Melayu, mengamalkan budaya Melayu, dan berkomitmen untuk membangun dan mengembangkan masyarakat Melayu, sehingga kandidat teridentifikasi sebagai bagian dari etnik Melayu dan dianggap oleh masyarakat Melayu sebagai kandidat pemimpin masyarakat Melayu dalam arti yang luas; 2) figur kandidat mampu bersosialisasi dengan masyarakat etnis Melayu; 3) etnis minoritas lainnya dan partai politik mendukung kandidat. Kandidat dari etnis Melayu gagal karena minimnya kontribusinya kepada masyarakat Melayu pada khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya.

Dikirim: 13 Juli, 2020;
Diterima: 22 Agustus, 2020;
Dipublikasi: 31 Agustus, 2020;

Kata Kunci: Gubernur; Kepulauan Riau; Melayu; Perilaku Memilih; Pilgub; Politik Identitas; Primordialisme

1. Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu agenda penting dalam kegiatan politik untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota. Pembahasan Pemilihan Gubernur (*Pilgub*) semakin signifikan dalam ranah politik lokal, apalagi jika pembahasan tersebut terkait dengan pemekaran Daerah Otonomi Baru dalam penerapan sistem pemilihan kepala daerah langsung. Dalam penelitian [Muhtadi \(2018\)](#), disebutkan bahwa beberapa faktor penting dalam pemilihan kepala daerah tersebut antara lain adalah politik identitas yang terdiri dari agama dan etnis. Alhasil, analisis variabel yang digunakan dalam penelitian perilaku memilih lebih pada pendekatan sosio-religius, sosio-kultural, atau sosio-ekonomi ([Gaffar, 1992](#); [King, 2003](#); [Ananta et al., 2004](#)) sebagaimana dikutip dalam [Haryanto \(2014\)](#). Di sisi lain, penelitian ini menggambarkan bahwa orientasi pemilih terhadap politik dipengaruhi oleh kualitas personal kandidat yang sudah terbangun sejak lama dan memiliki ikatan yang kuat dengan masyarakat sehingga popularitas kandidat tersebut didasarkan pada agenda kebijakan. Fokus penelitian ini adalah bagaimana primordialisme dan perilaku memilih etnis Melayu pada Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau tahun 2005-2015.

Sejak 2005, pemilihan kepala daerah langsung dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Pemilihan kepala daerah pertama untuk Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada bulan Juni 2005, di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sebelumnya, kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, perubahan ini memperkuat semangat primordialisme. Tak heran bila isu etnisitas di Indonesia saat ini sangat dominan dalam pemilihan kepala daerah. Identitas etnis dan citra kandidat kepala daerah yang akan dipilih merupakan politik identitas yang bagi pemilih menjadi pertimbangan penting dalam perilaku politik. Menurut [Nicholson \(2008\)](#), politik identitas adalah suatu gerakan politik yang muncul dan berkembang dari situasi minoritas dan kelompok yang dibedakan oleh mayoritas dalam suatu komunitas suatu negara. Potensi keberagaman yang merupakan kekuatan untuk melakukan gerakan politik memunculkan kesadaran komunal sehingga perbedaan identitas memunculkan kesadaran komunal. Sebagai kekuatan komunal, identitas budaya dalam hal ini cukup efektif dalam mengikat dan mengintegrasikan diri dalam konstruksi masyarakat yang berperilaku dengan nilai-nilai.

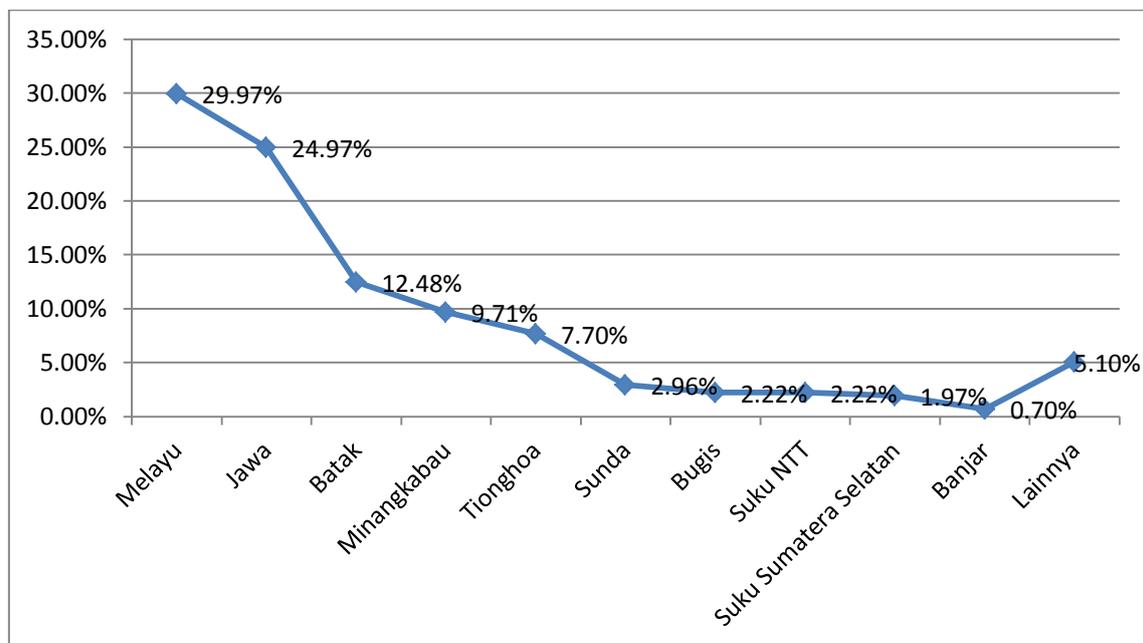
Di luar negeri, identitas politik dominan di Arab ([Ben-Bassat & Dahan, 2010](#)), dan berlangsung di India ([Kaul, 2013](#)). Fenomena yang dapat dianggap sebagai paradoks dalam demokrasi tersebut telah terwujud dalam proses demokrasi di beberapa daerah di era otonomi daerah saat ini. Etnis dan agama sebagai salah satu kategori sosial kemudian berkembang menjadi bagian terpenting dari politik identitas, bahkan simbol dan kategori sosial tersebut seringkali menjadi dasar legitimasi dalam persaingan politik di daerah. Kemudian muncullah istilah politik etnis ([Kristianus, 2016, p. 88](#)). Identitas etnis dalam kontestasi politik pilkada digunakan dalam tiga cara, 1) dalam memobilisasi simbol kesukuan; 2) menjadi pertimbangan pemilih, dan 3) dalam pemilihan dan strategi kandidat seperti Putra Daerah ([Aspinall, 2011](#)). Politik lokal di Kalimantan Barat sarat dengan politik identitas etnis. Etnis Dayak dan etnis Melayu bersaing memperebutkan kekuasaan politik dalam pemilihan kepala daerah. Persaingan terjadi karena elit etnis yang berkuasa selalu menjalankan hegemoni etnis atas etnis lain. Dari tujuh kabupaten di Kalimantan Barat yang menyelenggarakan pemilihan kepala

daerah, terlihat sangat jelas berorientasi etnis untuk memenangkan suara (Kristianus: 2016, p. 87). Dalam konteks pemilihan kepala daerah, identifikasi identitas etnis menjadi penting untuk mendapatkan dukungan politik. Identifikasi identitas etnis lebih banyak diterapkan dalam masyarakat multi etnis (Lampe, 2010, p. 300).

Di beberapa daerah di Indonesia, politik etnis telah mendominasi pemilihan kepala daerah sejak era reformasi. Fakta dan realitas ontologis dan sosiologis menyatakan bahwa kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala daerah secara langsung telah memperkuat dominasi etnis/suku dalam masyarakat multi etnis yang ditampilkan dalam bentuk identitas politik. Dalam penelitian Hemay & Munandar (2016) menyatakan bahwa politik etnis menguat pada pemilihan kepala daerah Bengkulu tahun 2010. Menurut Nasution (2014), dominasi politik etnis juga terjadi di Medan. Dalam penelitian Aspinall (2011), disebutkan pula bahwa dominasi politik etnisitas dengan identitas etnis dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dalam penelitian Buchari (2014) disebutkan bahwa politik etnis Dayak pada pemilihan kepala daerah Kalimantan Barat tahun 2007 mengalami penguatan. Hal ini sejalan dengan penelitian Trihartono & Patriadi (2016), dimana politik etnis dan sektarian pada Pemilu 2014 di Indonesia semakin menguat. Perpecahan etnis dan aliran politik tidak bisa ditinggalkan dalam pemilu Indonesia. Bahkan aliran politik dapat menjadi salah satu dimensi dari endogenitas identitas religio-politik. Kebangkitan identitas etnis di wilayah Indonesia telah bergulir sejak penyelenggaraan pemilu langsung tahun 2004. Identitas Politik terjadi akibat konflik agama, etnis, otonomi daerah dan desentralisasi administrasi di daerah seperti yang diteliti oleh Schulte Nordholt, yaitu konflik etnis, otonomi daerah, desentralisasi administrasi di luar pulau Jawa merupakan identitas politik yang eksis. Politik identitas agama dan etnis sebagai repertoar untuk kepentingan politik, seperti di Riau dan Bali (Nordholt, 2008).

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa politik identitas muncul dalam politik lokal bahkan semakin kuat dalam pemilihan kepala daerah. Dalam penelitian ini, fenomena politik di Kepulauan Riau tampak berbeda dengan daerah lain yang didominasi etnis Melayu sejak kandidat dari etnis non-Melayu memenangkan pemilihan kepala daerah. Identitas politik Melayu tidak terjadi pada politik lokal dalam pemilihan kepala daerah Kepulauan Riau.

Provinsi Kepulauan Riau dengan luas 425.214.676 km² dengan 95 persen wilayahnya terdiri dari lautan dan memiliki 2.408 pulau yang terbentang dari Selat Malaka hingga Laut Cina Selatan dan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga yang terdiri dari Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam merupakan satu kesatuan provinsi kepulauan. Kepulauan Riau berpenduduk 1.864.142 (2015) dihuni oleh Melayu 29,97%, Jawa 24,97%, Batak 12,48%, Minangkabau 9,71%, Tionghoa 7,70%, Sunda 2,96%, Bugis 2,22%, Suku NTT 2,22%, Suku Sumatera Selatan 1,97% , Banjar 0,70%, dan suku lainnya 5,10%. Etnis Melayu merupakan etnis dominan di Provinsi Kepulauan Riau (Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2015).



Gambar 1. Persentase Etnis di Kepulauan Riau

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau (2015)

Berdasarkan **Gambar 1** di atas, 29,97% etnis Melayu merupakan etnis Melayu yang dianggap secara genealogis (keturunan Melayu). Namun definisi orang Melayu dalam penelitian ini adalah bahwa orang Melayu dikaitkan dengan Islam, bahasa, dan adat istiadat, yang kemudian disebut pemilih pribumi sehingga bekerjanya politik identitas Melayu yang identik dengan Islam, 78,15% pemilih muslim di Kepulauan Riau disebut pemilih pribumi sebagai identitas Melayu asli. Berdasarkan sebaran penduduk menurut kabupaten/kota dan agama yang dianut di Kepulauan Riau tahun 2019, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang beragama Islam (identitas Melayu) di setiap kabupaten/kota di Kepulauan Riau lebih dari 70% Muslim, yang mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Melayu (**Tabel 1**).

Tabel 1. Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama di Kepulauan Riau

Kabupaten/Kotamadya	Agama					
	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Kabupaten						
1. Karimun	85,06	3,64	0,99	0,01	9,95	0,36
2. Bintan	87,58	5,00	2,20	0,08	4,81	0,33
3. Natuna	96,97	1,39	0,35	-	1,13	0,15
4. Lingga	91,63	1,72	1,10	-	5,49	0,06
5. Anambas Islands	93,26	2,06	2,29	-	2,38	0,01
Kotamadya						
1. Batam	71,73	17,94	3,28	0,06	6,86	0,12
2. Tanjungpinang	79,58	6,32	1,35	0,02	12,49	0,25
Kepulauan Riau	78,15	11,89	2,43	0,05	7,31	0,18

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau (2019)

Berdasarkan pantauan langsung, pemilihan gubernur di Kepulauan Riau selama tiga periode tahun 2005, 2010, dan 2015 selalu dimenangkan oleh kandidat etnis non-Melayu. Meski merupakan etnis minoritas, pasangan kandidat non-Melayu, Ismeth Abdullah dan H. Muhammad Sani memenangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau pada tahun 2005 (Detiknews.com, 2005).

Tahun 2010, etnis minoritas Jawa, H. Muhammad Sani dan Soerya Respationo memenangkan Pemilihan Gubernur (Kompas, 2010). Begitu pula pada tahun 2015, pasangan kandidat etnis Jawa, H. Muhammad Sani dan Nurdin Basirun memenangkan Pemilihan Gubernur (Ammelia & Kosandi, 2019, p. 143). Meski demikian, muncul berbagai persepsi dari kelompok identitas etnis Melayu asli dari kandidat terpilih non-Melayu. Kebanyakan kelompok masyarakat Melayu tidak menanggapi hal ini dengan kekerasan atau represif. Bahkan masyarakat Melayu pun menerima kandidat terpilih yang mengusung lambang Melayu dalam memimpin Kepulauan Riau.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini membahas tentang primordialisme dan perilaku memilih etnis Melayu pada Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau tahun 2005-2015.

2. Tinjauan Pustaka

Pendekatan dalam menyelidiki perilaku memilih terdiri dari tiga; *The Columbia Study*, *The Michigan Model*, dan *Rational Choice* (Bartels, 2012; Roth, 2008) sebagaimana dikutip dalam Haryanto (2014). Ketiga pendekatan ini lebih dikenal sebagai pilihan sosiologis, psikologis, dan rasional. Penelitian ini secara singkat menggunakan tiga pendekatan untuk lebih memahami perilaku pemilih.

Yang pertama adalah pendekatan sosiologis yang dikenal sebagai *The Columbia Study* yang dipelopori oleh Lezarsfeild pada tahun 1940. Pendekatan ini mengasumsikan nilai-nilai sosiologis tersebut seperti agama, kelas sosial, etnis, ras, daerah, tradisi keluarga, dan lain-lain yang tertanam dalam perilaku individu yang mempengaruhi individu dalam politik (Bartels, 2012, p. 240 sebagaimana dikutip dalam Haryanto, 2014). Lingkaran sosial seperti keluarga, tempat kerja, pertemanan, kedaerahan, dan sebagainya dapat mempengaruhi perilaku memilih seseorang karena adanya kontrol dan tekanan sosial (Roth, 2008, p. 24 seperti dikutip dalam Haryanto, 2014). Perilaku memilih dalam perspektif sosiologi memiliki dasar analisis utama yaitu kondisi sosial, bukan individu yang menjadi pusat analisis (Mujani et al., 2012 seperti dikutip dalam Haryanto, 2014). Pendekatan sosiologis dapat mengungkap perilaku pemilih yang konstan karena kerangka struktural setiap individu yang hanya berubah secara perlahan. Namun, model sosiologis tidak dapat menjelaskan penyebab bergesernya pilihan politik individu.

Pendekatan kedua adalah pendekatan psikologis atau yang disebut *The Michigan Model*, suatu pilihan pendekatan perilaku yang berkembang pada awal 1950-an. Penjelasan lengkap tentang pendekatan psikologis dapat ditemukan dalam "*The American Voter*" (1960) oleh Angus Campbell, Philip Converse, Warren Miller, dan Donald E. Stokes. Berbeda dengan model sosiologis, dalam model psikologis, beberapa keterikatan/dorongan psikologis membentuk orientasi politik seseorang. Ikatan psikologis ini disebabkan oleh rasa kedekatan dengan partai atau kandidat. Persepsi dan penilaian individu terhadap kandidat atau tema yang diangkat (pengaruh jangka pendek) sangat mempengaruhi pilihan pada pemilu. Secara sederhana, menurut Roth (2008, p.38) seperti yang dikutip dalam Haryanto (2014), pendekatan psikologis berusaha menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan memilih berdasarkan tiga sikap: keberpihakan, pendapat tentang masalah, dan citra dari kandidat. Keyakinan ini paling

dekat dengan keputusan penentuan suara dan oleh karena itu memiliki dampak langsung dan sangat kuat terhadap perilaku memilih (Dalton, 2002, p. 173 seperti dikutip dalam Haryanto, 2014). Keberpihakan sebagai konsep dalam pendekatan psikologis adalah kedekatan psikologis, yaitu hubungan yang stabil dan langgeng antara kandidat dan pemilih. Kondisi kandidat melakukan identifikasi diri sebagai orang yang membaaur dengan komunitas pemilih sebagai bagian dari komunitas kelompok. Identifikasi kandidat dengan masyarakat disebut *Personal ID*, yaitu perasaan kandidat bahwa kedaerahan adalah identitas politiknya, melakukan identifikasi diri sebagai putra daerah dalam konteks yang sangat luas, atau merasa menyatu dengan masyarakat tertentu, meskipun secara genetik tidak berdarah asli daerah tersebut.

Pendekatan ketiga adalah pendekatan model *Rational Choice*. *Rational Choice* merupakan model pendekatan di luar dua model pendekatan sosiologis dan psikologis, yang merupakan kritik terhadap kedua pendekatan tersebut. Awal dari pendekatan ini adalah teori ekonomi (Mujani *et al.*, 2012; Bartels, 2012) sebagaimana dikutip dalam Haryanto (2014). Model ini dapat dipahami dengan analisis ekonomi-politik, dimana orientasi pemilih yang rasional ini merupakan hasil yang dicapai oleh kandidat tertentu dalam politik. Ketiga model pendekatan perilaku memilih tersebut dapat saling mempengaruhi, tidak harus kontradiktif. Pada dasarnya secara proporsional, aktor mana yang dominan dan secara ilmiah dapat menjelaskan keputusan pemilih.

Mengenai teori yang berkaitan dengan pengelompokan etnis, menurut Mutakin (2004), pengelompokan masyarakat Indonesia didasarkan pada ikatan primordial yang terdiri dari ikatan kekerabatan berdasarkan hubungan darah (genealogis) atau keturunan, ikatan ras atau etnis, bahasa, dan agama. Oleh karena itu, menurut Hapsa & Purnomo (2016), politik identitas dapat menumbuhkan relasi antaretnis di suatu daerah sehingga dapat memiliki modal sosial yaitu menduduki kekuasaan. Artinya, politik identitas bukan hanya soal hegemoni. Jadi dalam perspektif lain, menurut Zakina (2016), politik identitas di daerah mempengaruhi minoritas, ketika tokoh-tokoh minoritas tersebut dapat mempengaruhi bahkan memobilisasi kelompok mayoritas dengan menjalin relasi dengan kelompok lain.

Menurut Haboddin (2012), politik etnisitas digunakan untuk mempertanyakan antara "kami" dan "mereka", "saya" dan "kamu" bahkan hingga bentuk ekspresi sarkasme "Jawa" dan "luar Jawa" atau "Islam" dan "Kristen". Dikotomi oposisi semacam ini sengaja dibangun oleh elit politik lokal untuk memukul musuh atau rival politik mereka yang merupakan "pendatang". Munculnya gerakan daerah dengan mengambil *setting* politik etnisitas merupakan bagian dari politik identitas sebagai basis gerakan politiknya. Bahkan telah disoroti oleh banyak pengamat bahwa gerakan politik identitas semakin banyak digunakan oleh para politisi dan penguasa di tingkat lokal untuk mendapatkan "kue" kekuasaan, baik di bidang politik maupun ekonomi. Oleh karena itu, menurut Castells (2004), politik identitas dijelaskan sebagai konstruksi identitas, melalui tiga sudut pandang yang berbeda, yaitu: *legitimizing identity*, *resistance identity*, and *project identity*. *Legitimizing Identity* menggambarkan pembentukan identitas yang dipaksakan oleh sebuah institusi dominan, misalnya negara, dalam hal ini, hegemoni kekuasaan negara. Sedangkan *Resistance Identity* merupakan salah satu identitas yang dibangun dengan perlawanan terhadap keseragaman identitas yang dilakukan oleh lembaga yang dominan, yaitu identitas tandingan. *Resistance Identity* adalah pemahaman tentang perspektif identitas yang dibangun dari kelompok yang tertindas, termarginalisasi, atau terdevaluasi oleh kelompok dominan. Dapat diartikan bahwa cara pandang ini dapat dengan mudah ditemukan di antara kelompok minoritas dan mereka yang termarginalisasi, biasanya diberikan kepada kelompok etnis, ras, etnis, atau bahkan agama tertentu. *Project Identity*

merupakan identitas yang dibangun secara antusias oleh kelompok-kelompok yang menjunjung tinggi otonomi dan ingin lepas dari ikatan masa lalu (Castells, 2004).

Oleh karena itu, perhatian pada politik identitas etnis umumnya tertarik untuk mengkaji kedekatan hubungan antar etnis di wilayah yang episentrumnya adalah kelompok mayoritas. Bagaimana hal ini menarik untuk diteliti karena kelompok mayoritas dan etnis minoritas di suatu negara berupa model interaksi politik identitas etnik yaitu jaringan komunitas yang dilandasi oleh norma solidaritas, saling percaya, dan kemandirian sumber daya adalah hal yang menarik. Oleh karena itu, Mackay (2000) dan Brown (2001) menyebutkan tiga tipe identitas etnis sebagai berikut;

- 1) Primordialisme, perspektif ini melihat identitas etnis yang stabil, *fixed, ascribed*, atau identitas manusia yang diberikan sejak manusia lahir. Identitas ini melekat dan tidak dapat ditolak oleh manusia itu sendiri, tidak dapat diubah dalam jangka waktu yang relatif lama. Pendekatan primordial menekankan pada identitas etnis dan agama yang dipandang memiliki landasan historis, genetik (keturunan/darah asli), dan sosial yang dalam sehingga secara signifikan membangun loyalitas dan komitmen para anggotanya.
- 2) Instrumentalisme, yaitu perspektif yang melihat identitas sebagai bentuk manipulasi dari beberapa kelompok dominan. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat seperti budaya, ras, dan agama yang berlaku di masyarakat dijadikan sebagai alat mobilisasi oleh elit politik untuk memperebutkan kepentingan politik dan ekonomi. Pendekatan instrumental menggunakan identitas etnis untuk memobilisasi kelompok untuk mencapai tujuan politik dan material, misalnya memobilisasi etnis untuk penguasaan sumber daya politik dan ekonomi. Praktik politik etnis dengan jelas menunjukkan seberapa efektif isu ini digunakan oleh aktor politik ketika berhadapan dengan entitas politik lain.
- 3) Konstruktivisme, yaitu upaya merespon tekanan situasi kelompok yang dominan, respon terhadap perlakuan pilih kasih, serta upaya defensif dari suatu kelompok. Berdasarkan pandangan tersebut, proses konstruksi sosial selalu dikaitkan dengan keterlibatan kelompok dan elit masyarakat.

Berdasarkan pemaparan tipe politik identitas etnis di atas, terdapat keterkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, khususnya bagaimana primordialisme dan perilaku pemilih etnis Melayu pada pemilihan Gubernur Kepulauan Riau 2005-2015. Dimana relevansi ketiga tipe tersebut di atas yaitu Primordialisme, Instrumentalisme, Konstruktivisme dengan politik identitas Melayu sebagai model interaksi politik identitas, dimana kemampuan berinteraksi dengan identitas etnis dalam politik adalah menjalin hubungan yang mempunyai sifat saling ketergantungan antar etnis dan bersifat terbuka atau kompatibel dalam interaksi politik menjadi identitas komunitas dalam pertarungan pemilihan kepala daerah, dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Model interaksi politik identitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokratisasi di Indonesia.

Penelitian ini secara khusus membahas bagaimana primordialisme dan perilaku pemilih etnis Melayu dalam Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau 2005-2015. Hasil studi sebelumnya yang diuraikan di atas menemukan bahwa politik identitas terjadi dalam ranah politik lokal; bahkan politik identitas muncul dan menguat dalam politik lokal di negara-negara dunia. Namun penelitian ini membahas bagaimana politik identitas Melayu tidak terjadi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Kepulauan Riau. Kemudian objeknya juga berbeda dengan penelitian sebelumnya. Setidaknya ada dua penelitian sebelumnya yang dijadikan referensi, pertama, Aspinall (2011) dalam *Journal of East Asian Studies*, Volume 11, Nomor 2, "Democratization and Ethnic Politics in Indonesia: Nine Theses". Penelitian ini menggunakan

deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengkaji polarisasi politik etnis dan demokratisasi di Indonesia. Setelah jatuhnya Presiden Suharto pada tahun 1998, etnisitas telah menjadi pusat politik lokal di sebagian besar wilayah Indonesia.

Hasil penelitian Aspinall tentang penyebab utama penyebaran politik etnis di Indonesia adalah faktor kelembagaan, tradisi identitas bangsa Indonesia, dan arsitektur politik. Penelitian Aspinall juga menemukan bahwa identitas etnis atau etnis dalam pertarungan politik pemilihan kepala daerah atau pemilihan gubernur di Indonesia digunakan dalam tiga cara, 1) dalam memobilisasi simbol kesukuan; 2) menjadi pertimbangan pemilih, dan 3) dalam pemilihan dan strategi kandidat seperti Putra Daerah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Hemay & Munandar (2016) dengan judul "Politik Identitas dan Pencitraan Kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model penjelasan sosiologis, psikologis, dan *rational choice*. Penelitian ini membahas tentang politik identitas etnis pada Pemilihan Gubernur Bengkulu tahun 2015. Faktor identitas etnis atau sentimen etnis, bersama dengan faktor citra tokoh, dapat berkontribusi positif dalam pembentukan perilaku pemilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fakta dan realitas ontologis dan sosiologis menyatakan bahwa kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala daerah secara langsung memperkuat aliran etnis dalam masyarakat multietnis yang ditampilkan dalam bentuk politik identitas. Pemilihan Gubernur Bengkulu tahun 2010 menunjukkan bahwa identitas etnis dan citra kandidat gubernur terpilih merupakan identitas politik yang bagi pemilih menjadi pertimbangan penting dalam perilaku politik.

Berdasarkan dua penelitian sebelumnya tersebut, dua hal yang dapat ditinjau, yaitu persamaan dan perbedaan. Persamaan yang terlihat dari dua studi sebelumnya tersebut, baik tinjauan pertama maupun kedua, keduanya adalah studi tentang politik identitas etnis tersebut dilakukan, kemudian membahas bagaimana identitas etnis menjadi pertimbangan politik sekaligus tokoh kandidat yang dianggap layak dan telah terbukti berkontribusi untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan perbedaan yang dapat diambil dari penelitian sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Aspinall (2011) berfokus pada polarisasi politik etnis dan demokratisasi di Indonesia pasca jatuhnya Presiden Suharto pada tahun 1998. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hemay & Munawar (2016) lebih fokus pada lokus politik identitas dan pencitraan politik dalam pemilihan Gubernur Bengkulu tahun 2015. Sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada faktor politik identitas Melayu yang tidak terjadi dalam pemilihan gubernur dan faktor pemenang kandidat non-Melayu dalam Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi langsung. Informan dipilih dengan menggunakan *teknik purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini selain elit yang diwawancarai, namun pemilih juga diikutsertakan sebagai sarana untuk mengungkap perilaku memilih, seperti tokoh Melayu, tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat luas di Kepulauan Riau. Pengakuan pemilih (masyarakat umum di Kepulauan Riau sama dengan pendapat yang diwawancarai sebelumnya) dalam hal ini, masyarakat Melayu, pada prinsipnya masyarakat Melayu di Kepulauan Riau terbuka dan menerima setiap etnis untuk hidup berdampingan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan jika etnis lain dianggap memiliki wawasan yang lebih dalam, mereka dapat menjadi pemimpinnya sambil menunggu putra daerah siap bersaing dengan orang luar.

Teknik pengumpulan data menggunakan *purposive sampling* atau teknik *non random sampling* dimana pengambilan sampel ditentukan karakteristik tertentu yang menjadi tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Dalam studi kasus penelitian kualitatif ini, data digunakan untuk memeriksa hasil yang mengejutkan atau tidak terduga. Desain metode ini lugas dan mudah diterapkan karena tahapannya jelas dan terpisah. Selain itu, fitur desain ini memudahkan untuk mendeskripsikan dan melaporkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan berbagai kondisi, situasi, atau fenomena mengapa politik identitas tidak terjadi dalam Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau, lalu bagaimana politik identitas melayu dalam konteks realitas relasi antar etnis dalam Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau. Penelitian ini berupaya untuk menarik realitas politik identitas Melayu yang terbuka bagi etnis lain yang diusung untuk memajukan Kepulauan Riau sebagai ciri, watak, sifat, keunikan, model, tanda, atau gambaran kondisi, situasi, atau fenomena identitas masyarakat Melayu.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka berupa buku, jurnal, skripsi, dan informasi yang diperoleh dari sumber internet terkait dengan fokus penelitian. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari tiga kandidat terdaftar, Lembaga Adat Melayu (LAM), Majelis Ulama Indonesia (MUI), peneliti, akademisi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), tokoh Melayu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Pemerintah Kepulauan Riau. Pemilihan informan didasarkan pada kriteria dengan urutan sebagai berikut: kandidat gubernur dan kandidat wakil gubernur berurutan; Ismeth Abdullah (Gubernur Kepulauan Riau tahun 2005-2010), Soeryo Restipiono (Wakil Gubernur Kepulauan Riau tahun 2010-2015), Ansar Ahmad (mantan Bupati Bintan tahun 2005-2010 dan 2010-2015, anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2019-2024), Huzrin Hood (Bupati Kepulauan Riau tahun 2001-2003, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Riau tahun 1999-2001, Ketua Badan Pelaksana Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR)), Raja Malik Hafrizal (Ketua Yayasan Kebudayaan Indra Sakti Pulau Penyengat), Datuk Abdul Razak (Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau), Musaffa Abas (Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bintan), Razaki Persada (Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tahun 2012-2017), Sriwati (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Riau tahun 2013-2018, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Riau tahun 2018-2023), Abdul Malik (Peneliti Budaya Melayu, Dosen), Zamzami A Karim (Akademisi dan Pengamat Politik), dan Ahmadi (Tokoh Melayu dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bintan).

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2005 - 2015

Pilgub di Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan sebanyak tiga kali; pada 2005, 2010, dan 2015. Pada tahun 2005, pasangan kandidat Ismeth Abdullah dan H. Muhammad Sani memenangkan pemilihan. Hal tersebut terlihat dari hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau pada Pemilihan Gubernur tahun 2005 sebagai berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005

No	Nama Pasangan Kandidat	Total Suara	% Suara
1	Rizal Zein and Firman Bisowarno	27.522	5,40

No	Nama Pasangan Kandidat	Total Suara	% Suara
2	Ismeth Abdullah and H. Muhammad Sani	309.119	60,66
3	H. Nyat Kadir and Soeryo Respationo	172.923	33,94
Total		509.564	100

Sumber: [Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau \(2005\)](#)

Berdasarkan **Tabel 2** di atas dapat dideskripsikan dari segi etnis pasangan kandidat Pilgub 2005, yaitu Rizal Zein dari etnis Melayu berpasangan dengan Firman Bisowarno dari etnis Jawa, Ismeth Abdullah dari etnis Sunda-Arab berpasangan dengan H. Muhammad Sani dari etnis Jawa, H. Nyat Kadir dari etnis Melayu berpasangan dengan Soeryo Respationo dari etnis Jawa. Dalam pemilihan kali ini, etnis Melayu diwakili oleh H. Nyat Kadir dan Rizal Zein.

Pilgub di Provinsi Kepulauan Riau kemudian dilaksanakan pada tahun 2010, di mana pemenangnya adalah pasangan kandidat gubernur dan wakil gubernur, H. Muhammad Sani dan Soeryo Respationo, seperti terlihat pada **Tabel 3** berikut.

Tabel 3. Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010

No	Nama Pasangan Kandidat	Total Suara	% Suara
1	H. Nyat Kadir and H. Zulbahri	195.847	31,49
2	H. Muhammad Sani and Soeryo Respationo	231.951	37,30
3	Hj. Aida Zulaikha Ismeth and Eddy Wijaya	194.049	31,21
Total		621.847	100

Sumber: [Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau \(2010\)](#)

Berdasarkan sebaran etnis pasangan kandidat gubernur dan wakil gubernur pada Pilgub 2010 dapat dijelaskan yaitu, H. Nyat Kadir dari etnis Melayu berpasangan dengan H. Zulbahri dari etnis Minangkabau, H. Muhammad Sani dari etnis Jawa berpasangan dengan Soeryo Respationo dari etnis Jawa, Hj. Aida Zulaikha Ismeth dari etnis Batak Mandailing berpasangan dengan Eddy Wijaya dari etnis Melayu Riau. Pada pemilihan Gubernur 2010, pasangan H. Muhammad Sani dan Soeryo Respationo berhasil menjadi pemenang.

Kemudian dilaksanakan Pilgub Kepulauan Riau pada tahun 2015 yang diikuti oleh dua pasangan kandidat gubernur dan wakil gubernur, seperti terlihat pada **Tabel 4** berikut ini.

Tabel 4. Rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

No	Nama Pasangan Kandidat	Total Suara	% Suara
1	H. Muhammad Sani and Nurdin Basirun	347.515	53.20
2	Soeryo Respationo and Ansar Ahmad	305.688	46.80
Total		653.203	100

Sumber: [Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau \(2015\)](#)

Berdasarkan sebaran etnis pada Pilgub Kepulauan Riau tahun 2015 dapat dijelaskan yaitu, H. Muhammad Sani dari etnis Jawa berpasangan dengan Nurdin Basirun dari etnis Jawa, Soeryo Respationo dari etnis Jawa berpasangan dengan Ansar Ahmad dari etnis Sunda. Dalam

pemilihan ini dimenangkan oleh H. Muhammad Sani dan Nurdin Basirun sebagaimana terlihat pada hasil rekapitulasi Pilgub tahun 2015 pada **Tabel 4**.

Dari tiga kali pelaksanaan Pilgub di Kepulauan Riau, terlihat bahwa kandidat pemenang semuanya adalah keturunan Jawa yang sudah lama menetap di Kepulauan Riau, dan memiliki identitas Islam, berbahasa Melayu, dan berbudaya Melayu sehingga kandidat tersebut menjadi kandidat yang mewakili orang Melayu. Dapat dipahami bahwa kandidat pemenang seperti Ismeth Abdullah (pada Pemilihan Gubernur tahun 2005) dan H. Muhammad Sani (pada Pemilihan Gubernur tahun 2010 dan tahun 2015) selalu tampil dengan simbol identitas Melayu (identitas Islam, bahasa Melayu, budaya Melayu) di pertarungan pemilihan gubernur. Selain itu, kandidat pemenang (Ismeth Abdullah dan H. Muhammad Sani) memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan masyarakat Melayu. Namun, kandidat dari etnis Melayu asli (seperti H. Nyat Kadir) tidak berhasil memenangkan pemilihan gubernur. Hal ini membuktikan bahwa peran kepemimpinan para kandidat berpengaruh pada pemilihan gubernur. Meskipun kandidat yang menang secara genetis atau aslinya adalah bukan keturunan dari Melayu asli. Namun, kandidat yang terpilih menjadi Gubernur Kepulauan Riau seperti Ismeth Abdullah - H. Muhammad Sani pada 2005 dan H. Muhammad Sani - Soeryo Respationo pada 2010 dan H. Muhammad Sani - Nurdin Basirun pada 2015 diterima oleh masyarakat Melayu dan juga etnis lain di Kepulauan Riau.

Kekalahan kandidat etnis Melayu dalam pemilihan gubernur belum dimobilisasi untuk merebut simpati pemilih sehingga dukungan pemilih Melayu tidak tersegmentasi terhadap politisi Melayu seperti H. Nyat Kadir (mantan Ketua Lembaga Adat Melayu Batam). Kadang mereka bertanya siapa yang harus kita pilih, sangat penting diberikan jawaban tegas dari tokoh adat, yaitu ketua Lembaga Adat Melayu tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Namun dalam kasus ini, tidak pernah ada seruan bagi etnis Melayu untuk memilih Melayu dari lembaga ini. Suara Melayu diberi kebebasan memilih untuk tidak terikat pada fatwa, himbauan, dan sebagainya. Sehingga dapat dipahami bahwa tidak ada mobilisasi isu etnis. Pasalnya, sejak pemilihan gubernur pertama tahun 2005, dengan terpilihnya gubernur pertama di Kepulauan Riau, yang bukan dari keturunan Melayu, melainkan dari keturunan Sunda-Arab, yakni Ismeth Abdullah, yang berhasil membangun Melayu dengan karakter yang berbaur dengan komunitas Melayu. Hal ini sebagai akibat dari karakter orang Melayu yang berpikiran terbuka. Kepulauan Riau sejak dulu, sejarahnya telah mengembangkan budaya Melayu melalui keturunan Melayu non-pribumi seperti tokoh Melayu Raja Ali Haji yang berasal dari keturunan Bugis.

4.2. Politik Identitas Melayu tidak terjadi pada Pilgub di Kepulauan Riau

Hasil penelitian menemukan bahwa politik identitas Melayu tidak terjadi dalam Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau karena pertama, Provinsi Kepulauan Riau dibentuk pada tahun 2002, kurang lebih 3 tahun sebelum Pilgub pertama tahun 2005, yang dimenangkan oleh seorang kandidat yang bukan dari keturunan Melayu yaitu Ismeth Abdullah. Kedua, jika dilihat dari sejarah Melayu, tokoh Melayu seperti Raja Ali Haji bukan keturunan Melayu asli, melainkan keturunan Bugis. Ketiga, perilaku memilih masyarakat Melayu di Kepulauan Riau yang terbuka dan kualitas personal kandidat (*Personal ID*) yang berpadu dengan budaya Melayu, sejarah Melayu, dan geopolitik (daerah) Melayu serta etnis lain di Kepulauan Riau. Meski kandidat-kandidat tersebut bukan keturunan asli atau keturunan Melayu seperti Ismeth Abdullah (Gubernur Kepulauan Riau tahun 2005) dan H. Muhammad Sani (Gubernur Kepulauan Riau periode 2010 dan 2015), semua kandidat tersebut diterima oleh masyarakat Melayu sebagai perwakilan kandidat dari Melayu. Selain itu, etnis Melayu - Kepulauan Riau

memiliki ciri khas yang unik dibandingkan dengan etnis Melayu - Riau, Aceh, Jambi, dan lainnya.

Model Interaksi Politik Identitas adalah kemampuan berinteraksi dengan Identitas Etnis dalam politik untuk menjalin hubungan yang interdependen antar etnis dan terbuka atau kompatibel dalam interaksi politik menjadi Identitas Komunitas dalam pertarungan pemilihan kepala daerah, dan mampu beradaptasi dengan yang ada. perubahan. Model Interaksi Politik Identitas diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokratisasi di Indonesia. Politik identitas dalam konteks teori dapat dipahami sebagai sesuatu yang hidup dalam setiap etnis. Politik identitas etnis muncul ketika dalam konteks empiris identitas politik sebagai kekuatan politik yang mendominasi partisipasi yang tercipta melalui budaya masyarakat. Salah satunya adalah politik identitas Melayu yang tidak terjadi dalam Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau. Dimana terdapat pemahaman tentang politik identitas yang tidak terjadi pada pemilihan Gubernur Kepulauan Riau, sehingga primordialisme tidak terjadi dalam Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau karena kandidat yang berasal dari keturunan asli Melayu yaitu H. Nyat Kadir (kandidat gubernur Kepulauan Riau pada tahun 2005 dan 2010) kalah dalam kompetisi pemilihan gubernur. Namun instrumentalisme, di mana figur kandidat yang bisa bersatu dengan identitas Melayu memenangkan pemilihan gubernur padahal gubernur yang dipilih bukan keturunan Melayu seperti Ismeth Abdullah (Gubernur Kepulauan Riau tahun 2005) dan H. Muhammad Sani (Gubernur Kepulauan Riau pada tahun 2010 dan 2015). Namun pada kenyataannya, semua gubernur yang bukan keturunan asli di tanah Melayu diterima karena perilaku mereka menggunakan simbol identitas Melayu seperti identik dengan Islam, berbicara bahasa Melayu, berbudaya Melayu, dan berhasil membangun dan berkontribusi bagi pembangunan di tanah Melayu Kepulauan Riau sehingga masyarakat Melayu memilih kandidat tersebut sebagai gubernur di Kepulauan Riau. Kemenangan gubernur terpilih tidak ditentukan oleh identitas etnis Melayu karena banyak etnis lain yang bermukim di Kepulauan Riau, seperti Jawa, Minang, Bugis, Tionghoa, dan lainnya. Konstruktivisme, dalam konteks politik identitas Melayu, tidak terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Kepemimpinan Melayu yang kemudian berhasil mengidentifikasi dirinya sebagai identitas Melayu di Kepulauan Riau, didukung oleh etnis Jawa dan etnis lainnya kepada kandidat yang berhak memimpin masyarakat Melayu dalam konteks yang luas.

4.3. Pikiran Terbuka sebagai Ciri Khas Identitas Melayu

Penerimaan masyarakat Melayu terhadap Ismeth Abdullah dan H. Muhammad Sani dikarenakan kandidat pemenang berhasil menjalin hubungan yang kuat dengan identitas Melayu sehingga mengidentifikasi diri sebagai orang Melayu dengan mengusung simbol identitas Melayu. Ciri khas identitas Melayu yang sangat terbuka terhadap etnis lain seperti Jawa, Minang, Batak, Tionghoa, Bugis, Flores, dan lain-lain membuat etnis lain yang sudah lama tinggal di Kepulauan Riau mengintegrasikan diri sebagai orang Melayu dan masyarakat Melayu asli. Jadi orang pribumi menerima mereka sebagai keluarga besar Melayu.

Politik identitas melayu identik dengan Islam, keterbukaan pikiran, keramahan, dan manusia yang berbudaya. Berdasarkan instrumen ini, identitas melayu sangat terbuka terhadap etnis lain. Namun ada sisi khusus ke-Melayu-an, yaitu rasa memiliki atau tanggung jawab untuk mengangkat harkat dan martabat orang Melayu yang memiliki sejarah yang panjang Tumasik dan juga dari Kerajaan Sriwijaya, sehingga terkesan primordialisme politik Melayu yang kental. Orang Melayu selalu berbicara tentang apakah seorang pemimpin daerah harus berasal dari orang Melayu. Orang Melayu yang dimaksud adalah orang Melayu dalam arti luas, orang yang sudah lama tinggal di Tanah Melayu dan mengidentifikasi diri sebagai

orang Melayu sehingga dapat mengangkat martabat budaya Melayu. Sehingga kandidat yang mengusung identitas primordialisme politik Melayu dalam pemilihan gubernur dianggap oleh orang Melayu sebagai wakil dari kandidat orang Melayu karena kandidat tersebut sudah bersatu dengan masyarakat Melayu. Hal itu dibenarkan kandidat wakil gubernur pada Pilkada 2015 dan dua kali menjabat Bupati Bintan, Ansar Ahmad, yang mengatakan:

“Saya keturunan Sunda, tapi saya mengidentifikasi diri saya sebagai orang Melayu. Orang Melayu sudah bersembati dengan saya” (Wawancara, Ansar Ahmad, kandidat Wakil Gubernur pada Pilgub 2015, 17 Juni 2020).

Berbeda dengan politik etnis di Indonesia yang sangat dominan, sehingga menurut Aspinall, setelah runtuhnya Orde Baru, identitas etnis dalam pertarungan politik pada pemilihan kepala daerah di Indonesia sangat kuat. Ini digunakan dalam tiga cara, 1) dalam memobilisasi simbol kesukuan; 2) menjadi pertimbangan pemilih, dan 3) dalam pemilihan dan strategi kandidat seperti Putra Daerah (Aspinall, 2011). Namun, berbeda dengan etnis Melayu di Kepulauan Riau, yang sangat berbeda dengan etnis di seluruh Indonesia, tidak terdapat konflik antar etnis bahkan etnis lain melebur dengan identitas Melayu, sehingga mempengaruhi perilaku politik seseorang dimana dia tinggal. Semangat “dimana bumi diinjak, disitulah langit dijunjung”, dimana kita berada, disitulah adat dan budaya tempatan kita junjung. Ini dibuktikan dengan penelitian Mary R. Anderson; Interaksi antar kelompok terbentuk karena rasa kebersamaan disebut Identitas Kelompok (*Community Identity*), yang mempengaruhi perilaku politik seseorang (Anderson, 2010). Ketika identitas kelompok diperkuat sebagaimana menurut Linda Nicholson, politik identitas adalah suatu gerakan politik yang muncul dan berkembang dari situasi kelompok-kelompok yang termarginalisasi dan dibedakan oleh masyarakat mayoritas suatu negara. Potensi perbedaan yang merupakan kekuatan untuk melakukan gerakan politik memunculkan kesadaran komunal sehingga perbedaan identitas memunculkan kesadaran komunal. Sebagai kekuatan komunal, identitas budaya cukup efektif untuk mengikat dan mengintegrasikan diri dalam suatu komunitas menjadi suatu konstruksi kelompok yang memiliki nasib dan sejarah yang sama (Nicholson, 2008). Menurut Raja Malik Hafrizal, identitas politik Melayu sangat terbuka bagi etnis manapun karena tiga faktor, yaitu faktor budaya Melayu, faktor sejarah Melayu, dan faktor wilayah geografis di Kepulauan Riau (Wawancara, Raja Malik Fahrizal, Ketua Yayasan Kebudayaan Indra Sakti Pulau Penyengat, 14 Juni 2020). Ketiga faktor tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi nilai-nilai Melayu yaitu sopan santun, ramah, dan dapat bermetamorfosis dengan etnis lain.

Ciri khas identitas Melayu yang terbuka karena Melayu bukan etnis melainkan disebut ras. Jadi politik identitas Melayu yang lebih besar identik dengan Islam. Melayu itu Islam, sebaliknya Islam itu Melayu yang menjadikan semua orang atau masyarakat yang tinggal di Kepulauan Riau yang beragama Islam dan yang sudah lama tinggal di Kepulauan Riau disebut sebagai orang Melayu yang mempunyai hak pilih (Wawancara, Abdul Malik, Peneliti Budaya Melayu dan Akademisi, 15 Juni 2020). Sehingga orang Melayu tidak terjerat dengan belitan ikatan primordial seperti yang diyakini oleh penelitian lain. Lalu, faktor keberhasilan kandidat gubernur Melayu dari segi etnis Melayu; mereka mempelajari karakter orang Melayu, misalnya dalam pergaulan sehari-hari mereka harus taat dan taat pada prinsip-prinsip norma yang ada. Apalagi kandidat gubernur etnis non-Melayu biasanya lebih familiar di kalangan masyarakat dan berhasil mewujudkan janji-janjinya sehingga masyarakat akan percaya untuk memimpin mereka untuk kedua kalinya, maka peluang dan kesempatan untuk terpilih di tingkat yang

lebih tinggi akan terus berlanjut. Misalnya, di tingkat nasional, Ansar Ahmad pernah dua kali terpilih menjadi Bupati Bintan dan saat ini menjadi anggota DPR RI di Jakarta.

4.4. Figur Kandidat yang mudah berbaur dengan Identitas Melayu dan Opini Publik Melayu

Identitas budaya Melayu di Kepulauan Riau kuat karena masyarakat Melayu Kepulauan Riau dalam sejarahnya berasal dari kerajaan Tumasik dan Sriwijaya sehingga primordialisme Melayu terikat erat. Untuk mengangkat harkat dan martabat, pemimpin hendaknya berasal dari orang Melayu dalam arti yang luas, yaitu orang yang sudah lama tinggal di Tanah Melayu, berbudaya Melayu, dan yang lebih penting berkontribusi pada pembangunan negeri Melayu. kemudian pemimpinnya diterima sebagai orang Melayu (Wawancara, Ansar Ahmad, kandidat wakil gubernur pada Pilgub tahun 2015, 17 Juni 2020). Pengertian pemimpin putra daerah dari orang Melayu dalam konteks yang sangat luas juga sama dengan pendapat informan kunci, Ketua Badan Pelaksana Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR), Huzrin Hood yang mengatakan bahwa:

“Konsep etnis Melayu atau putra daerah daerah Melayu adalah pertama, tanah Melayu terbuka untuk semua orang, bahkan untuk semua pendatang. Kedua, tokoh-tokoh yang datang membela orang Melayu. Saat memimpin, dia juga pandai mengontrol masyarakat, menyediakan berbagai fasilitas atau proyek, sehingga banyak yang mendukung. Pada tahun 2010, H. Muhammad Sani (Gubernur Kepulauan Riau periode 2010 dan 2015), yang bukan keturunan Melayu sebagai orang birokrat, mengusung simbol Melayu agar mudah menguasai masyarakat. Padahal mereka bukan orang Melayu, mereka membawa simbol Melayu dan menghormati orang Melayu, itulah yang membuat mereka menang” (Wawancara Huzrin Hood, Ketua BP3KR, 12 Juni 2020).

Karakter orang Melayu yang berpikiran terbuka di Kepulauan Riau turut mempengaruhi identitas etnis lainnya yang sangat mendukung pemimpin wilayah Melayu dalam arti luas yang dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat orang Melayu dan berpihak pada orang Melayu, sehingga menjadi pemimpin yang “bersembati” (menyatu) dengan nilai dan budaya Melayu yang dianggap sebagai putra daerah Melayu (Wawancara, Musaffa Abas, Tokoh Melayu & Ketua Lembaga Adat Melayu Bintan, 13 Juni 2020). Tokoh Melayu yang diterima masyarakat Melayu adalah tokoh yang bisa bermetamorfosis dengan Melayu (Wawancara, Ansar Ahmad, kandidat wakil gubernur pada Pilgub 2015, 17 Juni 2020). Bahkan kelompok etnis lain sangat mendukung tipe pemimpin yang mengusung identitas Melayu dan berpihak pada Melayu, seperti yang dikatakan Huzrin Hood:

“Negeri ini adalah negeri tanah Melayu, kerajaan Melayu. Namun masyarakat yang tinggal di negeri ini bukanlah mayoritas masyarakat Melayu, hanya sekitar 20% saja. Itu juga bukan penentu untuk menang. Masih banyak etnis lain seperti Batak, Jawa, Padang, Tionghoa dan lain-lain, jika orang-orang itu menghormati orang Melayu dan kondisi tanah Melayu ketika mereka mengangkat pemimpin mereka akan berpihak pada orang Melayu” (Wawancara, Huzrin Hood, Ketua Badan Pelaksana Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, 12 Juni 2020).

Figur kandidat yang *bersembati* dengan jati diri Melayu dan telah berjasa dan berkomitmen membangun Melayu Kepulauan Riau merupakan potensi suara dalam pemilihan Gubernur di Kepulauan Riau. Selain itu, faktor kepemimpinan dalam konteks Melayu menurut Raja Malik Hafrizal, Ketua Yayasan Kebudayaan Indra Sakti Pulau Penyengat, mempengaruhi *personal branding* (pencitraan diri) dalam pemilihan gubernur Kepulauan Riau. Menurut Raja Ali Haji, ada tiga jenis konsep kepemimpinan, yaitu pertama, jenis kepemimpinan raja sebagai khalifah, pemimpin yang membawa keutamaan Alquran, dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam memimpin rakyat. Kedua, jenis kepemimpinan raja sebagai sultan, dimana pemimpin sebagai penegak hukum rakyat. Ketiga, jenis kepemimpinan raja sebagai iman, dimana pemimpin berada di garis depan dalam memperjuangkan rakyat.

Faktor utama masyarakat Melayu yang menjadi pertimbangan dalam memilih dan mendukung politisi dalam pemilihan Gubernur Kepulauan Riau diketahui dan diukur melalui pengakuan pemilih dan tokoh Melayu bahwa faktor kemampuan tokoh dapat berkontribusi pada Melayu (Wawancara, Raja Malik Hafrizal, Tokoh Melayu & Ketua Yayasan Kebudayaan Indra Sakti Pulau Penyengat, 14 Juni 2020). Sehingga dalil bahwa di Kepulauan Riau menjual politik identitas sangat tidak relevan. Menurut pengamatan langsung memang tidak relevan karena asal etnik apapun asalkan memiliki identitas Melayu dapat diterima dan ditanyakan apa kontribusinya kepada orang Melayu itu sendiri jika yang bersangkutan terpilih menjadi gubernur, bupati atau walikota. Biasanya etnis lain selalu bisa menyesuaikan diri dengan etnis Melayu; Mereka menjadikan Melayu sebagai payung dan pelindung etnis lain di Kepulauan Riau.

4.5. Kualitas Personal Kandidat yang Terbukti (*Personal ID*) sebagai Potensi Suara

Perilaku pemilih Melayu di Kepulauan Riau memilih dan mendukung kandidat "A" daripada kandidat "B, C, atau Lainnya" karena faktor kualitas personal sangat penting. Kandidat diakui karena keberadaannya di masyarakat (sebelum masa kampanye) mendengar aspirasi masyarakat dan menawarkan program-program yang dibutuhkan, seperti program masyarakat pedesaan, program rumah layak huni, program peduli pendidikan, kesehatan, dan program lain yang membuat masyarakat Melayu sejahtera. Hal ini terlihat dari keberhasilan Gubernur terpilih H. Muhammad Sani terpilih kembali menjadi gubernur karena program kerja yang menarik dan pengalamannya di bidang birokrasi pemerintahan.

Kurun waktu 15 tahun (3 pemilihan gubernur di Kepulauan Riau) menunjukkan bagaimana perilaku memilih di Kepulauan Riau selalu sama dan tidak terlalu berbeda dalam pemilihan kandidat gubernur, belum ada fatwa dari tokoh masyarakat setempat untuk memilih kandidat A, B atau C. Yang paling ditekankan adalah memilih kandidat gubernur yang bisa mempertahankan entitas Melayu dan mampu memperjuangkan Melayu. Bagaimana dengan fenomena *split-ticket* yang terjadi pada pemilihan gubernur di Kepulauan Riau. *Split-ticket voting* merupakan fenomena politik di mana pemilih membagi pilihannya dalam beberapa pemilihan, misalnya antara pemilihan legislatif dan gubernur. Pada Pemilu Legislatif 2014 dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), namun pada Pilgub 2015 dimenangkan oleh Partai Nasional Demokrat (NasDem), yakni pasangan H. Muhammad Sani - Nurdin Basirun mengalahkan pasangan dari PDI Perjuangan, Soeryo Respationo - Ansar Ahmad. Salah satu penyebab gagalnya kandidat yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan dan Partai Golongan Karya (Golkar) adalah *split-ticket voting* yang dilakukan oleh pemilih PDI Perjuangan. Tidak semua pemilih Golkar memilih Soeryo Respationo dan hanya sebagian dari pemilih Golkar yang memilih Ansar Ahmad. Faktor pemilih sengaja melakukan *split-ticket voting* untuk tujuan tertentu. Pada Pilgub 2015, pemilih lebih banyak melihat program dan isu

yang diangkat serta figur kandidat gubernur, H. Muhammad Sani, yang sudah terbukti berpengalaman di birokrasi pemerintahan.

4.6. Dukungan Partai Politik dan Etnis Minoritas Lain untuk Kandidat Etnis Non-Melayu

Etnis lain di luar komunitas Melayu memiliki peran besar dalam memenangkan kandidat. Para kandidat berupaya mendekati komunitas identitas etnis lainnya melalui asosiasi etnis, seperti etnis Jawa melalui Paguyuban Among Mitro, etnis Minang melalui Minang Bersatu, etnis Batak melalui Forum Batak Bersatu, etnis Tionghoa melalui Perhimpunan Tionghoa Kepri, dan lainnya. Menurut Ansar Ahmad, kandidat wakil gubernur pada Pilgub tahun 2015, mengatakan etnis lain di luar Melayu sebagian besar mengidentifikasi diri sebagai orang Melayu. Sehingga dengan demikian kandidat yang memiliki warna ke-Melayu-an yang kental dan bersatu dengan komunitas Melayu akan didukung oleh komunitas identitas etnik lainnya seperti Jawa, Minang, Sunda, Bugis, Tionghoa, dan lain-lain. Meskipun secara budaya, Melayu di Kepulauan Riau dominan, semua orang non-Melayu merasa mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Melayu dan etnis lainnya menganggap orang Melayu dalam konteks luas yang berhak memimpin orang Melayu di Kepulauan Riau.

Peran partai politik dalam pemilihan gubernur di Kepulauan Riau sangat menentukan karena partai politik dalam menentukan kandidatnya akan memilih kandidat pemenang dari sudut pandang tertentu. Hasil survei yang bukan merupakan survei rekayasa perlu diperdalam, tergantung kandidatnya. Partai politik juga dalam menentukan kandidat memperhatikan kebutuhan masyarakat Melayu, yang bisa dijual dan program apa yang bisa menarik perhatian masyarakat itu sendiri. Pengamatan langsung menunjukkan perilaku kartel melalui kesepakatan tak kasat mata yang tercermin dari keputusan pimpinan partai politik yang memecat anggota partai yang dicalonkan oleh partai lain.

5. Kesimpulan

Hasil penelitian menemukan bahwa politik identitas Melayu tidak terjadi dalam pemilihan gubernur karena perilaku memilih masyarakat Melayu yang terbuka di Kepulauan Riau dan kualitas personal kandidat (*Personal ID*) yang menyatu dengan budaya Melayu, sejarah Melayu, dan geopolitik Melayu (kedaerahan) dan etnis lainnya di Kepulauan Riau. Padahal kandidat-kandidat tersebut bukan secara genealogis atau keturunan Melayu seperti Ismeth Abdullah (Gubernur Kepulauan Riau tahun 2005) dan H. Muhammad Sani (Gubernur Kepulauan Riau tahun 2010 dan 2015). Semua kandidat tersebut diterima oleh masyarakat Melayu sebagai kandidat perwakilan dari Melayu. Kemenangan kandidat dalam pemilihan gubernur ditentukan oleh pertama, ciri khas politik identitas Melayu yang berpikiran terbuka dan memiliki simbol identitas Islam, berbicara bahasa Melayu, mengamalkan budaya Melayu, dan berkomitmen mengembangkan wilayah Melayu di Kepulauan Riau, sehingga kandidat yang memiliki dan mengidentifikasi diri sebagai orang Melayu dianggap oleh masyarakat Melayu sebagai wakil dari pemimpin orang Melayu. Kedua, figur kandidat yang bisa *bersembati* (bersatu) dengan identitas Melayu dan terbukti berhasil membangun wilayah Melayu merupakan aset potensial untuk mendulang suara. Ketiga, kandidat didukung oleh komunitas identitas etnis lain seperti Jawa, Minang, Batak, Sunda, Bugis, Tionghoa, dan lainnya.

Dalam konteks primordialisme Melayu, meskipun yang disebut orang Melayu secara sempit memiliki semua keturunan asli (genealogis) darah Melayu, dalam konteks Melayu yang lebih luas, orang Melayu adalah orang-orang yang telah lama tinggal di tanah Melayu dan berkomitmen untuk mengembangkan Melayu. Sehingga dalam konteks politik identitas Melayu instrumental, dimana figur kandidat yang bisa *bersembati* (menyatu) dengan identitas

Melayu memenangkan pemilihan gubernur meskipun gubernur terpilih bukan keturunan Melayu, seperti gubernur terpilih tidak secara genetis asli atau keturunan Melayu seperti Ismeth Abdullah (Gubernur Kepulauan Riau periode 2005) dan H. Muhammad Sani (Gubernur Kepulauan Riau periode 2010 dan 2015), tetapi semua gubernur yang bukan keturunan asli di tanah Melayu diterima oleh masyarakat Melayu karena mereka bertindak sebagai orang Melayu sehingga orang Melayu memilih kandidat gubernur tersebut di Kepulauan Riau.

Maka dengan karakteristik terbuka dari identitas Melayu di Kepulauan Riau, konstruktivisme terjadi dalam konteks orang Melayu di Kepulauan Riau, yang menyebabkan orang Melayu memilih kandidat non-Melayu untuk menjadi gubernur di Kepulauan Riau yang mengusung simbol Melayu dan berkomitmen untuk mengembangkan wilayah Kepulauan Riau, mengalahkan kandidat gubernur yang berasal dari keturunan Melayu asli seperti H. Nyat Kadir (kandidat gubernur pada Pilgub tahun 2005 dan 2010). Bagi Orang Melayu di Kepulauan Riau, gubernur tidak ditentukan oleh etnis dan identitas melainkan kualitas.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua informan yang telah berkontribusi selama penelitian ini, juga pengulas anonim atas ulasan kritisnya pada artikel ini.

7. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Ammelia, E., & Kosandi, M. (2019). Politik Kartel di Tingkat Lokal: Studi Pemilihan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Periode Sisa 2016-2021. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 1(2), 138-150. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v1i2.72>
- Anderson, M. R. (2010). *Community Identity and Political Behavior*. New York, United States: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9780230109759>
- Aspinall, E. (2011). Democratization and Ethnic Politics in Indonesia: Nine Theses. *Journal of East Asian Studies*, 11(2), 289-319. <https://doi.org/10.1017/s1598240800007190>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. (2015). *Kepulauan Riau dalam Angka 2015*. Retrieved from <https://kepri.bps.go.id/publication/2016/02/04/e1dbab45df325fd00fa0b1ac/kepulauan-riau-dalam-angka-2015.html>
- Ben-Bassat, A., & Dahan, M. (2010). Social identity and voting behavior. *Public Choice*, 151(1-2), 193-214. <https://doi.org/10.1007/s11127-010-9742-2>
- Brown, M. E. (2001). *Nationalism and ethnic conflict*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- Buchari, S. A. (2014). *Kebangkitan etnis menuju politik identitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Castells, M. (2004). *The network society: A cross-cultural perspective*. Cheltenham: Edward Elgar Pub.
- Detiknews.com. (2005, July 14). Pilkada Kepri, Calon yang Kalah Minta Diulang. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-403129/pilkada-kepri-calon-yang-kalah-minta-diulang>
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau. (2019). *Data Kependudukan Semester II 2019*. Tanjung Pinang: Dinas

- Pemerdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau.
- Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 3(1), 116-134. Retrieved from <https://journal.umy.ac.id/index.php/jsp/article/view/152>
- Hapsa, H., & Purnomo, E. P. (2016). Relasi Kuasa Identitas Etnis Dilembaga Legislatif Periode 2014-2019 (Studi Kasus Anggota DPRD Etnis Bugis Dikabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau). *Journal of Governance and Public Policy*, 3(1), 124-146. <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0053>
- Haryanto, H. (2014). Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(3), 291-308. <https://doi.org/10.22146/jsp.13082>
- Hemay, I., & Munandar, A. (2016). Politik Identitas dan Pencitraan Kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, 12(1), 1737-1748. Retrieved from <http://journal.unas.ac.id/politik/article/view/163>
- Kaul, A. B. (2013). *Ethnic Politics and Urban Voting Behavior in India: Explaining Variation in Electoral Support for the Bharatiya Janata Party, 1999-2009* (Dissertation). Department of Government and Politics, Faculty of the Graduate School of the University of Maryland. Retrieved from <https://drum.lib.umd.edu/handle/1903/14124>
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. (2005). *Rekapitulasi Perolehan Suara Pilgub Kepri Tahun 2005*. Tanjung Pinang: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. (2010). *Rekapitulasi Perolehan Suara Pilgub Kepri Tahun 2010*. Tanjung Pinang: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. (2015). *Rekapitulasi Perolehan Suara Pilgub Kepri Tahun 2015*. Tanjung Pinang: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau. Retrieved from https://kepri.kpu.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=150:rekapitulasi-perolehan-suara-pilgub-kepri-tahun-2015&catid=24&Itemid=308
- Kompas.com. (2010, June 9). Sani-Soerya Menangi Pemilukada Kepri. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2010/06/09/14221632/Sani.Soerya.Menangi.Pemilu.kada.Kepr>
- Kristianus, K. (2016). Politik dan Strategi Budaya Etnik dalam Pilkada Serentak di Kalimantan Barat. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(1), 87-101. <https://doi.org/10.15294/jpi.v1i1.9182>
- Lampe, I. (2010). Identitas Etnik dalam Komunikasi Politik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(3), 299-313. Retrieved from <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/133>
- Mackay, B. (2000). Ethnicity. In W. Braun & R. T. McCutcheon (Eds.), *Guide to the Study of Religion*. London, United Kingdom: Cassell.
- Muhtadi, B. (2018). Politik Identitas dan Mitos Pemilih Rasional. *Maarif*, 13(2), 68-86. Retrieved from <http://jurnal-maarifinstitute.org/index.php/maarif/article/view/23>
- Mutakin, A. (2004). *Dinamika Masyarakat Indonesia*. Bandung: PT. Ganesindo.
- Nasution, I. K. (2014). Ethnicity, Democracy and Decentralization: Explaining the Ethnic Political Participation of Direct Election in Medan 2010. *Procedia Environmental Sciences*, 20, 496-505. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2014.03.062>
- Nicholson, L. (2008). *Identity before Political Identity*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Nordholt, H. S. (2008). Identity Politics, Citizenship and the Soft State in Indonesia: an Essay. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 1(1). <https://doi.org/10.14203/jissh.v1i1.1>

- Trihartono, A., & Patriadi, H. B. (2016). The 2014 Indonesian general election and beyond. *Asian Journal of Comparative Politics*, 1(1), 25–43. <https://doi.org/10.1177/2057891115620699>
- Zakina, N. F. N. (2016). Politik Etnisitas dan Compliance Gaining Kandidat Minoritas dalam Pilkada Kalimantan Barat. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 1(2), 122-129. <https://doi.org/10.25008/jkiski.v1i2.58>

Tentang Penulis

1. **Kustiawan**, memperoleh gelar Magister bidang Ilmu Politik dari Kokushikan University, Jepang, pada tahun 2008. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia.
E-Mail: kustiawan@umrah.ac.id
2. **Rumzi Samin**, memperoleh gelar Doktor dari Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia, pada tahun 2012. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia.
E-Mail: rumzisamin@umrah.ac.id